

SUBSTANSI PERUBAHAN PERATURAN

**Per. KPK No. 1 Tahun 2026
tentang Perubahan atas
Per. KPK No. 2 Tahun 2019
tentang Pelaporan Gratifikasi**

Jakarta, 4 Februari 2025

• • •

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik

Kedeputan Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK

PERATURAN KPK TENTANG **PELAPORAN GRATIFIKASI**



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PELAPORAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan



PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dengan meningkatkan ketepatan substansi, kepatuhan, dan efisiensi, serta memperkuat mekanisme pelaporan gratifikasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

AGENDA



01

Latar Belakang & Tujuan

02

**Poin Perubahan pada
Per. KPK No. 1/2026**

03

Simpulan

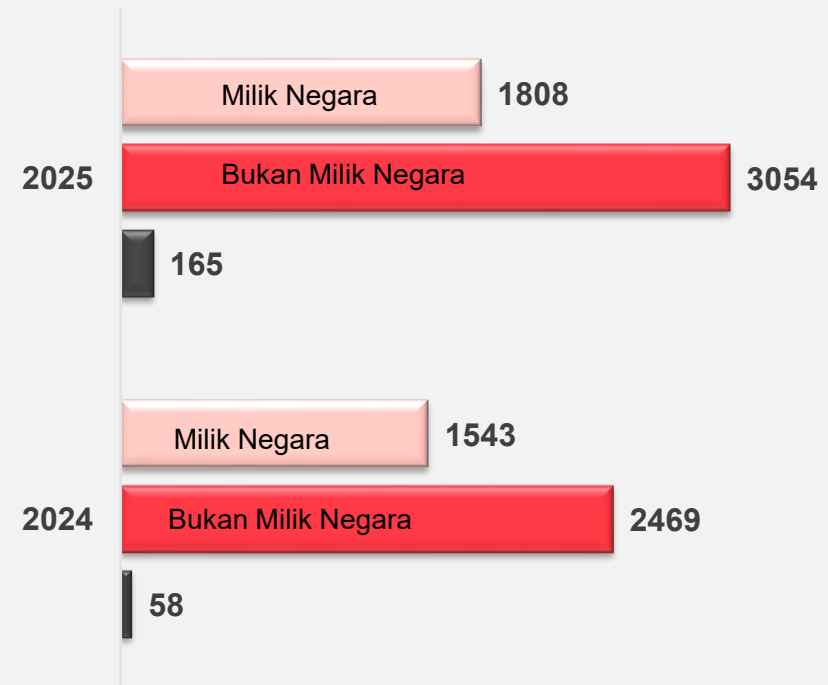
MENGAPA ATURAN **DIPERBARUI?**

LATAR BELAKANG

Respon terhadap perkembangan kebutuhan hukum untuk meningkatkan ketepatan substansi, kepatuhan, dan efisiensi, serta memperkuat mekanisme pelaporan gratifikasi.

Laporan Gratifikasi Berdasarkan Status Penetapan

■ Milik Negara ■ Bukan Milik Negara
■ Lainnya/Proses



Tujuan



Meningkatkan keselarasan dalam pemahaman terkait bentuk gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan.

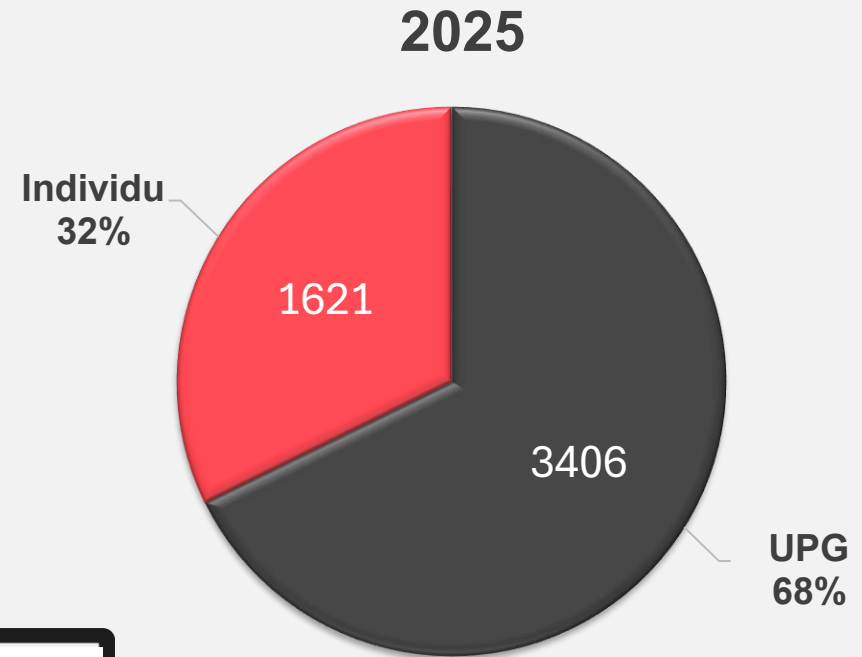


Menyederhanakan aturan pelaporan gratifikasi agar lebih mudah dipahami dan diterapkan.



Mendorong Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri agar tidak menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Laporan Gratifikasi Berdasarkan Sumber Laporan



PRINSIP PELAPORAN GRATIFIKASI



Kewajiban Lapor Gratifikasi

Penerima Gratifikasi (PN/Pn) wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima (Pasal 2 Ayat 1)



Penolakan Dapat Dilaporkan

PN/Pn yang **menolak** Gratifikasi **dapat melaporkan penolakan** Gratifikasi (Pasal 4A)



Laporan Gratifikasi >30 Hari Kerja

Laporan yang **melewati 30 HK, dapat ditetapkan menjadi milik negara.** Namun, ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 jo. UU 20/2001 **tetap berlaku** (Pasal 17)

POIN PERUBAHAN PADA **PER. KPK NO. 1/2026**

Ketentuan Gratifikasi Tidak Wajib Laporkan

Jenis	Sebelum	Sesudah
Sesama rekan kerja	Rp. 200.000 / pemberi (total Rp. 1.000.000/ tahun)	Rp. 500.000 / pemberi (total Rp. 1.500.000/ tahun) Tidak dalam bentuk uang/alat tukar lainnya dan sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan
Sesama rekan kerja (pisah sambut/ pensiun/ulang tahun)	Rp. 300.000 / pemberi	
Hadiah pernikahan/upacara adat-agama	Rp. 1.000.000 / pemberi	Rp. 1.500.000 / pemberi



TINDAK LANJUT LAPORAN GRATIFIKASI OLEH KPK

Penandatanganan SK Gratifikasi

Pimpinan dapat memberikan mandat penandatanganan SK sesuai dengan aturan Internal KPK.



Tindak Lanjut Kelengkapan Laporan

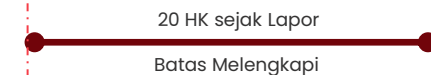
Sebelum : Dapat tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap >30 hari kerja dari tanggal penerimaan.

Sesudah : Tidak ditindaklanjuti penetapan status kepemilikannya jika tidak lengkap >20 hari kerja dari tanggal lapor.

**Per. KPK
2/2019**



**Per. KPK
1/2026**



TUGAS UPG unit pengendalian gratifikasi



Menerima, mengadministrasikan dan meneruskan laporan Gratifikasi dari Pn dan PN kepada Komisi



Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi yang dititipkan kepada UPG sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut



Melaksanakan & mengadministrasikan tindak lanjut penanganan laporan Gratifikasi sesuai dengan keputusan & penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh Komisi



Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi



Mendorong unit terkait pada instansinya untuk menyusun ketentuan pengendalian Gratifikasi



Memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada pihak internal instansi dalam implementasi ketentuan pengendalian Gratifikasi



Mendiseminasi kan ketentuan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi



TOLAK
GRATIFIKASI

SIMPULAN

- Setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban harus dilaporkan PN/Pn kepada KPK.
- Laporan gratifikasi adalah laporan penerimaan PN/Pn itu sendiri, bukan pengaduan dari pihak lain.
- Pengendalian gratifikasi merupakan tugas kita bersama melalui internalisasi dan eksternalisasi.



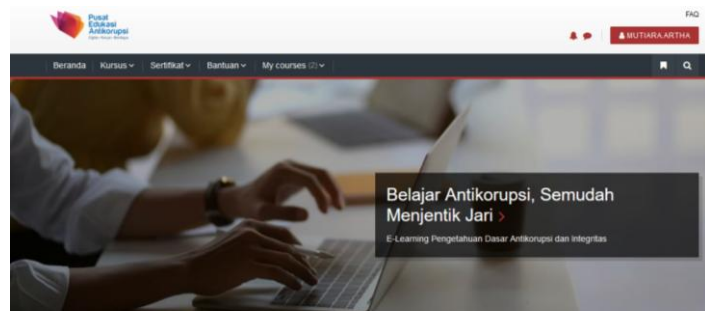
**“Our greatest ability
as humans is not to
change the world, but
to change ourselves”**

MAHATMA GANDHI

E-LEARNING

<https://newlearning.kpk.go.id>

ACLC KPK



▼ Open all ▶ Close all

Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.

- > Pendahuluan
- > Topik 1 : Nilai-nilai Antigratifikasi dalam Perspektif Budaya dan Agama
- > Topik 2 : Dampak Gratifikasi
- > Topik 3 : Gratifikasi, Suap dan Pemerasan
- > Topik 4 : Pelaporan Gratifikasi
- > Topik 5 : Peran Pegawai Negeri / Pengelenggara Negara dalam Pengendalian Gratifikasi
- > Post Test dan Penutup

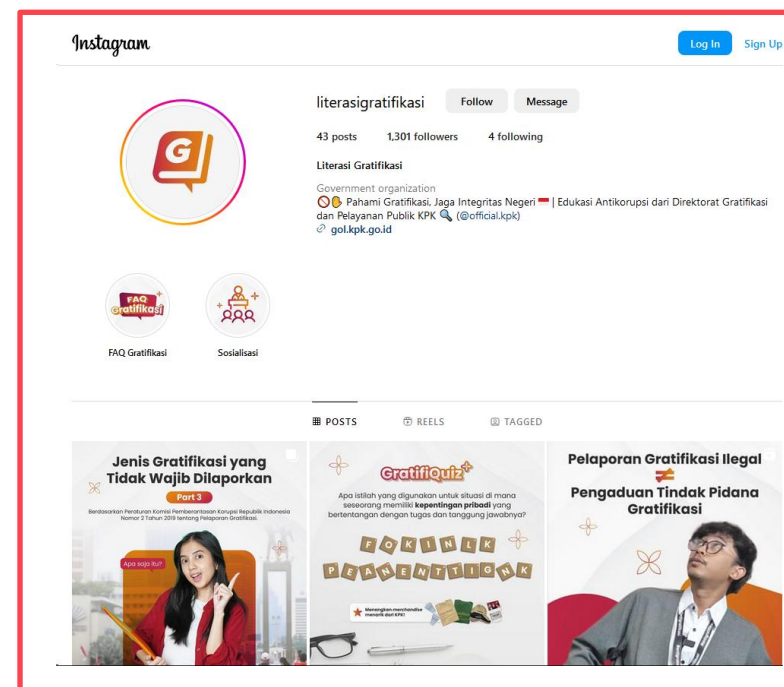
JAGA

<https://jaga.id/>
(JARINGAN PENCEGAHAN KPK)



LITERASI GRATIFIKASI

<https://www.instagram.com/literasigratifikasi/>
(Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK)



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik

Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi

Jalan H.R. Rasuna Said C1, Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

✉ pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

📷 @literasigratifikasi

✉ informasi@kpk.go.id

☎ 198

IKUTI KAMI

📷 official_kpk

▶ KPK RI

🐦 KPK_RI

📷 aclc.kpk

▶ ACLC KPK

📺 aclc.kpk

kpk.go.id